

**EFEKTIVITAS PEMBERANTASAN NARKOBA DI WILAYAH PERBATASAN MOROWALI UTARA PADA SATUAN RESERSE NARKOBA KANTOR KEPOLISIAN RESOR MOROWALI UTARA**

Sumardi<sup>1\*</sup>, Timuddin DG Mangera Bauwo<sup>2</sup>, Ince Dian Afnita<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

**RIWAYAT ARTIKEL**

**Diterima:**  
20-08-2025

**Disetujui:**  
12-11-2025

**Dipublikasi:**  
01-12-2025

**Kata Kunci:**

*Efektivitas; Pemberantasan Narkoba; Perbatasan; Polres Morowali Utara*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan Morowali Utara oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kantor Polres Morowali Utara. Informan dipilih secara purposive sampling, terdiri dari aparat kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta warga yang terlibat dalam program sosialisasi maupun rehabilitasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek pencapaian tujuan, Polres Morowali Utara berhasil meningkatkan jumlah pengungkapan kasus narkoba, namun upaya pencegahan dan rehabilitasi masih terbatas. Dari aspek integrasi, koordinasi antar-instansi sudah berjalan tetapi belum maksimal, sementara partisipasi masyarakat masih terhambat oleh keterbatasan akses komunikasi. Dari aspek adaptasi, pemanfaatan teknologi dan pendekatan humanis mulai dilakukan, tetapi implementasinya masih terbatas pada wilayah tertentu. Secara keseluruhan, pemberantasan narkoba di Morowali Utara masih lebih menitikberatkan pada penindakan, sementara aspek pencegahan dan rehabilitasi belum mendapat porsi yang seimbang. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sosialisasi di daerah terpencil, peningkatan fasilitas rehabilitasi, optimalisasi koordinasi antar-instansi, perluasan pemanfaatan teknologi, serta kemitraan berkelanjutan dengan masyarakat.

**PENDAHULUAN**

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih menjadi salah satu ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental generasi muda, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan keamanan. Narkoba mampu melemahkan potensi sumber daya manusia, menurunkan produktivitas, bahkan memicu tindak kriminal lain yang memperburuk stabilitas sosial. Kondisi ini membuat upaya pemberantasan narkoba menjadi prioritas nasional, sekaligus tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum (Lukman et al., 2021).

Kabupaten Morowali Utara termasuk salah satu daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap peredaran narkoba. Letak geografisnya yang berbatasan dengan wilayah laut terbuka, terdiri atas pegunungan dan pesisir, menciptakan jalur strategis sekaligus rawan untuk peredaran narkoba. Akses yang sulit dijangkau di beberapa desa justru seringkali dimanfaatkan oleh jaringan pengedar sebagai tempat transit. Kerentanan ini diperparah oleh kondisi sosial

masyarakat yang masih minim informasi tentang bahaya narkoba, sehingga menjadikan wilayah perbatasan sebagai sasaran empuk masuknya barang haram tersebut.

Dalam konteks lokal, Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Morowali Utara berperan sebagai garda terdepan dalam melaksanakan tugas pemberantasan. Upaya mereka tidak hanya terbatas pada penindakan hukum terhadap pengedar, tetapi juga menyentuh aspek pencegahan dan rehabilitasi bagi pengguna. Meski demikian, efektivitas kerja kepolisian seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, hingga minimnya fasilitas rehabilitasi di daerah. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai efektivitas kinerja Satresnarkoba sangat penting untuk melihat sejauh mana langkah-langkah yang ditempuh dapat menjawab persoalan narkoba di Morowali Utara.

Secara teoritis, penelitian ini merujuk pada teori efektivitas organisasi yang menekankan bahwa suatu organisasi dianggap efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui optimalisasi sumber daya, koordinasi internal, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan eksternal (Steers, 1985). Dalam konteks Polres Morowali Utara, efektivitas tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil diungkap, melainkan juga bagaimana hasil kerja tersebut berdampak pada penurunan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Artinya, efektivitas harus dipandang sebagai keseimbangan antara pencapaian tujuan formal dan respons adaptif terhadap dinamika sosial serta geografis di wilayah kerja mereka.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kerangka teori kebijakan kriminal yang menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui pendekatan integral, yaitu jalur penal dan non-penal. Jalur penal meliputi tindakan represif seperti penangkapan, penyidikan, dan pemidanaan pelaku, sementara jalur non-penal meliputi pencegahan melalui pendidikan, penyuluhan, serta rehabilitasi bagi pecandu. Dalam praktiknya, kedua jalur ini harus berjalan beriringan agar pemberantasan narkoba tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang berupa kesadaran dan pemulihan sosial (Hatta, 2010).

Permasalahan kemudian muncul ketika upaya Polres Morowali Utara masih cenderung berat pada jalur penal, sementara aspek pencegahan dan rehabilitasi belum mendapat porsi yang seimbang. Sosialisasi masih lebih banyak menyasar sekolah-sekolah di perkotaan, sedangkan masyarakat di desa-desa terpencil belum sepenuhnya tersentuh. Begitu pula fasilitas rehabilitasi yang terbatas, sehingga pengguna narkoba seringkali hanya diproses hukum tanpa mendapat kesempatan pemulihan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas kebijakan kriminal dengan realitas implementasi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pemberantasan narkoba oleh Satresnarkoba Polres Morowali Utara. Analisis diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi antar-stakeholder, dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika peredaran narkoba di wilayah perbatasan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kekuatan sekaligus kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan pemberantasan narkoba di Morowali Utara, serta membuka ruang bagi rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif di masa mendatang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan Morowali Utara oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengalaman, pandangan, dan praktik para aktor yang terlibat langsung dalam upaya penanggulangan narkoba.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Kepolisian Resor Morowali Utara, karena institusi ini merupakan garda terdepan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Selain itu, wilayah Morowali Utara memiliki kerentanan tinggi terhadap peredaran narkoba

mengingat letaknya yang berbatasan dengan daerah lain serta kondisi geografis yang cukup kompleks, mulai dari pesisir, dataran rendah, hingga pegunungan.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yakni pemilihan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dan mendalam terkait fokus penelitian. Informan terdiri dari personel Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara, aparat pemerintah daerah yang terkait dengan program pencegahan dan penindakan narkoba, tokoh masyarakat yang memahami kondisi sosial di wilayah perbatasan, serta masyarakat yang pernah terlibat dalam program sosialisasi maupun rehabilitasi.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat; observasi lapangan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai kondisi geografis serta pola aktivitas kepolisian; dan dokumentasi berupa arsip kepolisian, laporan penangkapan, maupun publikasi resmi terkait tindak pidana narkoba di Morowali Utara.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles & Huberman (1992) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data lapangan yang relevan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan data lapangan pada kerangka teori efektivitas organisasi, khususnya pada aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### Pencapaian Tujuan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan Morowali Utara telah membuahkan sejumlah pencapaian, terutama dalam hal penindakan. Salah satu anggota Satuan Reserse Narkoba mengungkapkan bahwa, *“Dalam dua tahun terakhir, jumlah kasus yang berhasil kami ungkap mengalami peningkatan. Banyak pelaku yang sudah ditangkap, sebagian besar pengedar sabu yang memanfaatkan jalur perbatasan untuk memasok barang.”*

Namun, meski keberhasilan penindakan cukup menonjol, pengawasan di wilayah perbatasan masih menghadapi tantangan. Seorang aparat pemerintah daerah menuturkan, *“Kondisi geografis Morowali Utara yang luas, dengan pegunungan dan pesisir, menyulitkan aparat untuk mengawasi semua jalur. Ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan jaringan pengedar.”*

Selain itu, upaya pencegahan melalui sosialisasi masih kurang merata. Seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Petasia menyampaikan bahwa, *“Sosialisasi memang ada, tapi kebanyakan hanya di sekolah-sekolah perkotaan. Desa-desa terpencil jarang tersentuh program penyuluhan.”* Kondisi ini berdampak pada masih rendahnya kesadaran masyarakat di daerah terpencil mengenai bahaya narkoba.

Sementara itu, upaya rehabilitasi dinilai masih terbatas. Salah seorang warga yang pernah mendampingi pengguna narkoba mengatakan, *“Yang lebih diperhatikan biasanya pengedar, sementara korban penyalahgunaan kurang mendapat akses rehabilitasi. Padahal, fasilitas untuk pemulihan itu sangat dibutuhkan.”*

#### Integrasi

Dari sisi integrasi, Polres Morowali Utara telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi seperti BNN, Bea Cukai, dan pemerintah daerah. Namun, menurut salah satu pejabat

kepolisian, *“Koordinasi memang ada, tapi sistem pertukaran informasi antar-instansi belum berjalan maksimal. Kadang informasi terlambat sampai, sehingga operasi tidak sinkron.”*

Masyarakat juga sudah mulai dilibatkan, meski masih menghadapi kendala. Seorang tokoh adat menyampaikan, *“Kami diajak ikut sosialisasi, tapi untuk melaporkan kasus masih sulit karena keterbatasan sarana komunikasi. Tidak semua desa punya akses cepat untuk melapor.”*

Di lapangan, sinergi antar-lembaga juga belum sepenuhnya terbangun. Ada kalanya terjadi tumpang tindih tugas, sebagaimana diungkapkan seorang aparat desa: *“Kadang operasi dilakukan sendiri-sendiri, belum terkoordinasi penuh. Akibatnya ada potensi celah yang tidak tertangani.”*

Selain itu, strategi pemberantasan narkoba dinilai masih lebih menekankan pada penindakan. Program pencegahan dan rehabilitasi belum menjadi fokus utama. Hal ini ditegaskan oleh seorang aktivis lokal yang mengatakan, *“Kalau hanya penangkapan, efeknya sementara. Harus ada keseimbangan dengan pencegahan dan rehabilitasi supaya hasilnya lebih nyata.”*

### **Adaptasi**

Dalam hal adaptasi, kepolisian Morowali Utara mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pengawasan. Seorang anggota kepolisian mengatakan, *“Kami sudah menggunakan pemantauan digital dan koordinasi daring dengan instansi lain, tapi penerapannya masih terbatas di wilayah perkotaan.”*

Aparat juga berusaha menyesuaikan diri dengan pola baru peredaran narkoba. Jaringan pengedar kini lebih canggih dalam memanfaatkan jalur-jalur tersembunyi. Menurut salah satu petugas intelijen, *“Kami terus memperbarui teknik investigasi, tapi wilayah yang sulit diakses masih jadi kendala besar.”*

Di sisi lain, pendekatan yang lebih humanis mulai diterapkan, khususnya bagi pengguna narkoba. Seorang perwira Polres menyatakan, *“Kalau pengguna, kami arahkan untuk direhabilitasi. Tapi memang masih lebih banyak fokus kami ke pengedar.”*

Kerja sama dengan masyarakat juga menjadi bagian dari adaptasi, meskipun belum optimal. Seorang guru di Kolonodale menuturkan, *“Polisi sudah sering datang ke sekolah untuk sosialisasi. Itu bagus, tapi harus lebih sering dan jangan hanya sekali dua kali.”*

### **Pembahasan**

Keberhasilan Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara dalam mengungkap kasus narkoba dari tahun ke tahun menunjukkan adanya konsistensi dalam penegakan hukum. Data wawancara dengan aparat menegaskan bahwa jumlah tersangka yang ditangkap mengalami peningkatan, menandakan adanya keseriusan dalam upaya pemberantasan narkoba. Capaian ini selaras dengan dimensi “disposisi” dan “sumber daya” dalam teori implementasi kebijakan Edward III (dalam Mulyadi, 2015), yang menekankan bahwa komitmen aparat serta dukungan sarana menjadi faktor penting keberhasilan implementasi. Namun demikian, keberhasilan penindakan ini belum sepenuhnya menjawab kompleksitas masalah, karena aspek komunikasi lintas-instansi dan struktur birokrasi masih menunjukkan kelemahan.

Hambatan geografis menjadi faktor signifikan yang diungkap oleh informan. Luasnya wilayah perbatasan dengan kondisi alam berupa pegunungan dan pesisir menciptakan celah bagi masuknya narkoba. Temuan ini memperkuat pandangan Lipsky (1980) dalam konsep street-level bureaucracy, bahwa kondisi lapangan yang sulit akan membatasi efektivitas aparat dalam menjalankan kebijakan. Dengan demikian, meskipun ada peningkatan jumlah penangkapan, akses geografis yang rumit membuat peredaran narkoba tetap memiliki ruang untuk berkembang.

Upaya pencegahan, sebagaimana dituturkan oleh masyarakat dan tokoh pendidikan, masih dirasakan kurang merata. Sosialisasi anti-narkoba lebih sering dilakukan di sekolah perkotaan, sementara desa-desa terpencil jarang mendapat perhatian. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan antara pendekatan represif dan preventif. Dye (2017) menekankan bahwa keberlanjutan kebijakan publik bergantung pada kombinasi antara penegakan hukum dan edukasi

publik. Tanpa penyuluhan yang merata, masyarakat pedesaan berisiko menjadi kelompok rentan yang tidak memiliki kesadaran penuh akan bahaya narkoba.

Kelemahan lain terlihat pada aspek rehabilitasi. Dari wawancara dengan aparat, diketahui bahwa sebagian besar pengguna yang ditangkap lebih banyak diproses hukum ketimbang diarahkan ke pemulihan. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan fasilitas rehabilitasi di daerah. Temuan ini menegaskan kritik akademik bahwa kebijakan narkoba Indonesia masih terlalu dominan menggunakan pendekatan penal policy, sementara pendekatan kesehatan masyarakat (public health approach) belum mendapat porsi yang memadai. Padahal, menurut kerangka harm reduction, rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah kunci untuk menekan angka pengguna berulang dan mencegah masalah sosial jangka panjang.

Dari sisi integrasi, koordinasi antar-instansi memang sudah terbangun, terutama dengan BNN, Bea Cukai, dan pemerintah daerah. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pertukaran informasi belum berjalan maksimal, bahkan kadang terjadi tumpang tindih tugas di lapangan. Osborne (2006) dalam konsep New Public Governance menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan membangun jejaring dan kolaborasi lintas-aktor. Tanpa koordinasi yang solid, kebijakan cenderung fragmentaris dan tidak efisien.

Masyarakat memang mulai dilibatkan melalui forum sosialisasi, namun informan masyarakat mengaku kesulitan melaporkan kasus karena keterbatasan akses komunikasi. Situasi ini selaras dengan kritik Norris (2001) mengenai digital divide, di mana keterbatasan akses teknologi dan komunikasi menciptakan kesenjangan partisipasi publik. Meskipun aparat mulai memanfaatkan pemantauan digital, penggunaannya masih terbatas di wilayah perkotaan, belum menjangkau daerah pelosok. Artinya, adaptasi kebijakan terhadap perkembangan teknologi masih berjalan parsial.

Meski begitu, ada indikasi perubahan pendekatan yang lebih humanis. Dari keterangan aparat, upaya rehabilitasi bagi pengguna mulai dipertimbangkan, meski porsinya belum besar. Selain itu, kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pihak sekolah dalam mendorong pencegahan dini sudah mulai dibangun. Hal ini penting karena sesuai dengan teori community policing, kolaborasi dengan masyarakat menjadi landasan dalam membangun ketahanan sosial terhadap bahaya narkoba. Namun, informan juga menekankan perlunya keberlanjutan program ini agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara telah menunjukkan performa positif dalam penindakan kasus narkoba, tetapi masih menghadapi tantangan besar dalam aspek pencegahan, rehabilitasi, dan integrasi lintas-aktor. Jika mengacu pada perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan yang ada saat ini baru mencakup sebagian dimensi, sementara dimensi lain masih memerlukan penguatan agar kebijakan penanggulangan narkoba dapat berjalan efektif, berimbang, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba di wilayah perbatasan Morowali Utara oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara telah memberikan capaian positif, khususnya dalam aspek penindakan. Jumlah kasus yang berhasil diungkap dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, menandakan adanya keseriusan dan komitmen aparat. Namun demikian, capaian ini belum sepenuhnya mampu menekan peredaran narkoba, karena masih terdapat tantangan yang signifikan, antara lain kondisi geografis perbatasan yang sulit dijangkau, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta belum meratanya sosialisasi dan edukasi pencegahan di wilayah pedesaan.

Dari sisi integrasi, koordinasi antar-instansi memang sudah berjalan, tetapi masih terdapat kelemahan dalam hal pertukaran informasi dan sinergi di lapangan. Pelibatan masyarakat juga

mulai dilakukan, namun terhambat oleh keterbatasan akses komunikasi serta kurangnya kontinuitas program. Sementara dari aspek adaptasi, penggunaan teknologi, pola investigasi baru, dan pendekatan humanis sudah mulai diterapkan, tetapi masih terbatas ruang lingkupnya.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya Polres Morowali Utara dalam pemberantasan narkoba lebih banyak berorientasi pada penindakan, sedangkan aspek pencegahan dan rehabilitasi belum mendapat perhatian yang seimbang. Padahal, pemberantasan narkoba yang efektif memerlukan strategi komprehensif yang melibatkan penegakan hukum, edukasi masyarakat, rehabilitasi pengguna, serta kolaborasi lintas-aktor yang lebih solid.

Untuk itu, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, memperluas jangkauan sosialisasi anti-narkoba hingga ke wilayah pedesaan terpencil melalui kemitraan dengan tokoh lokal dan lembaga pendidikan. Kedua, memperkuat fasilitas dan program rehabilitasi sebagai bagian dari strategi harm reduction agar pengguna narkoba tidak sekadar dipidana, tetapi juga dipulihkan. Ketiga, meningkatkan efektivitas koordinasi antar-instansi melalui sistem pertukaran data dan operasi bersama yang lebih terintegrasi. Keempat, memperluas pemanfaatan teknologi pemantauan hingga ke daerah pelosok dengan dukungan infrastruktur komunikasi. Terakhir, membangun pola kemitraan berkelanjutan dengan masyarakat, baik melalui tokoh agama, tokoh adat, maupun kelompok pemuda, sebagai basis ketahanan sosial dalam mencegah peredaran narkoba.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kebijakan pemberantasan narkoba di Morowali Utara tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mampu menciptakan keseimbangan antara upaya represif, preventif, dan rehabilitatif sehingga lebih efektif dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy (15th Ed.)*. Pearson Education Inc.
- Hatta, M. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Pelajar.
- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. UI-Press.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Sage Foundation.
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 405-417.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Norris, P. (2001). *Digital Divide? Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide*. Cambridge University Press. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139164887>
- Osborne, S. P. (2006). The New Public Governance. *Public Management Review*, 8, 377-388. <https://doi.org/10.1080/14719030600853022>
- Steers, R. M. (2020). *Efektivitas Organisasi: Kaidah Perilaku*. Erlangga.